



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 15756- 15764

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Transformasi Digital dalam Program Bantuan Langsung Tunai terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Delfi Yani¹, Ansharullah², Anggun Melani³, Dimas Dwi Nanda⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹12410620821@students.uin-suska.ac.id, ²ansharullah@uin-suska.ac.id, ³12410621131@students.uin-suska.ac.id,

⁴12410610543@students.uin-suska.ac.id

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sehingga pemerintah terus mengembangkan berbagai kebijakan perlindungan sosial, salah satunya melalui Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, implementasi BLT juga mengalami transformasi digital melalui pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta efektivitas penyaluran bantuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran transformasi digital dalam implementasi Program Bantuan Langsung Tunai terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research melalui pengumpulan data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah, buku, laporan pemerintah, serta publikasi lembaga nasional dan internasional yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai temuan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai melalui perbaikan kualitas pendataan penerima bantuan, percepatan proses verifikasi dan validasi data, peningkatan transparansi serta akuntabilitas penyaluran bantuan sosial, dan penguatan pengambilan keputusan berbasis data. Meskipun demikian, implementasi transformasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kualitas data yang belum sepenuhnya mutakhir, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, serta perlunya penguatan keamanan data pribadi. Oleh karena itu, optimalisasi transformasi digital melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan tata kelola data menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai sebagai instrumen kebijakan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Bantuan Langsung Tunai, Kemiskinan, DTKS, SIKS-NG, Perlindungan Sosial.

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Kemiskinan tidak hanya diukur dari rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta berbagai layanan publik lainnya. Kondisi tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlemah produktivitas masyarakat, dan meningkatkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah terus mengembangkan berbagai kebijakan perlindungan sosial sebagai upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Todaro & Smith, 2021; Badan Pusat Statistik, 2024).

Salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini merupakan bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin untuk menjaga daya beli serta memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, terutama pada saat terjadi tekanan ekonomi akibat inflasi, bencana, maupun pandemi Covid-19. Menurut Suharto (2017), bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan negara yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang mengalami kerentanan ekonomi. Sejalan dengan itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia (2023) menyatakan bahwa BLT menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial nasional.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah melakukan transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam sistem penyaluran bantuan sosial. Transformasi digital tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Menurut Mergel, Edelmann, dan Haug (2019), transformasi digital di sektor publik merupakan proses perubahan organisasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, implementasi transformasi digital diwujudkan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang mendorong seluruh instansi pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Transformasi digital dalam penyaluran BLT diwujudkan melalui pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sistem tersebut berfungsi sebagai basis data nasional yang digunakan untuk melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, serta pemutakhiran data masyarakat miskin sebagai calon penerima bantuan sosial. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2023), penggunaan DTKS dan SIKS-NG mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan serta mengurangi potensi kesalahan dalam proses pendataan. Digitalisasi tersebut juga mempercepat proses penyaluran bantuan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.

Dari perspektif ekonomi, digitalisasi penyaluran bantuan sosial memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan efektivitas kebijakan fiskal pemerintah. Ketepatan sasaran penerima bantuan akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sekaligus memperbesar dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2020), pemanfaatan teknologi digital dalam sektor publik mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Sementara itu, World Bank (2022) menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial menjadi salah satu strategi penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan di berbagai negara berkembang.

Meskipun demikian, implementasi transformasi digital dalam penyaluran BLT masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan masih terdapat permasalahan berupa ketidaksesuaian data penerima, keterlambatan pembaruan data, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Rahayu dan Permana (2022) menjelaskan bahwa validitas data penerima bantuan masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan efektivitas program BLT. Selain itu, Hidayat (2022) menemukan bahwa keterlambatan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan masih adanya masyarakat miskin yang belum memperoleh bantuan secara optimal.

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai dari perspektif ekonomi, seperti peningkatan daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, dan penurunan tingkat kemiskinan (Farhan & Putri, 2021; Nasution & Harahap, 2021). Di sisi lain, penelitian mengenai integrasi transformasi digital dalam sistem penyaluran bantuan sosial masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan Program BLT pada era digital tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas sistem informasi, pengelolaan data, serta tata kelola digital yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, novelty penelitian ini terletak pada integrasi perspektif ekonomi dan transformasi digital dalam menganalisis Program Bantuan Langsung Tunai terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas BLT sebagai instrumen kebijakan ekonomi, tetapi juga menganalisis bagaimana pemanfaatan sistem informasi digital, DTKS, SIKS-NG, dan digitalisasi pelayanan publik berkontribusi dalam meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan efektivitas program bantuan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan kebijakan perlindungan sosial berbasis transformasi digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif berbagai konsep, teori, hasil penelitian terdahulu, serta kebijakan pemerintah mengenai transformasi digital dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Menurut Creswell dan Creswell (2023), penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara mendalam melalui analisis berbagai sumber informasi yang relevan. Sementara itu, Zed (2018) menjelaskan bahwa studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang

memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu fenomena.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Sumber data meliputi artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA, jurnal internasional yang terindeks Scopus, buku ilmiah, prosiding seminar, laporan penelitian, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), World Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), United Nations Development Programme (UNDP), serta berbagai dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan transformasi digital, bantuan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. Pemanfaatan berbagai sumber tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai implementasi Program Bantuan Langsung Tunai serta perkembangan transformasi digital dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia (BPS, 2024; Kemensos RI, 2023; OECD, 2020).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi literatur. Peneliti melakukan identifikasi, penelusuran, seleksi, pengelompokan, serta pencatatan berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, Garuda, DOAJ, serta portal resmi pemerintah Indonesia. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian literatur meliputi *Digital Transformation*, *Digital Government*, *Social Assistance*, *Cash Transfer*, *Program Bantuan Langsung Tunai*, *Poverty Reduction*, *DTKS*, *SIKS-NG*, *Public Service Digitalization*, dan *Electronic Government*. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi lima tahun terakhir (2020–2025), namun beberapa referensi klasik tetap digunakan sebagai landasan teori yang mendukung analisis penelitian (Creswell & Creswell, 2023).

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi artikel ilmiah yang membahas Program Bantuan Langsung Tunai, transformasi digital pelayanan publik, digitalisasi bantuan sosial, sistem informasi kesejahteraan sosial, kebijakan perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. Sebaliknya, artikel yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian, memiliki kualitas ilmiah yang rendah, atau tidak tersedia secara lengkap (*full text*) tidak digunakan dalam proses analisis. Seleksi literatur dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa seluruh sumber yang digunakan memiliki kredibilitas, relevansi, dan kualitas akademik yang memadai sehingga dapat mendukung hasil penelitian secara objektif (Snyder, 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Krippendorff (2019), analisis isi merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan secara sistematis dari berbagai dokumen atau teks melalui proses pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi data. Pada penelitian ini, seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, yaitu transformasi digital dalam pelayanan publik, implementasi Program Bantuan Langsung Tunai, efektivitas bantuan sosial, pengelolaan data penerima bantuan, serta dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya, data dianalisis dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan temuan, kemudian menginterpretasikan hubungan antara transformasi digital dan efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan.

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, laporan pemerintah, serta publikasi lembaga internasional. Menurut Patton (2015), triangulasi sumber bertujuan meningkatkan kredibilitas penelitian melalui proses verifikasi informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai implementasi transformasi digital dalam Program Bantuan Langsung Tunai sekaligus meminimalkan potensi bias dalam interpretasi data.

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis yang meliputi: (1) identifikasi permasalahan penelitian berdasarkan fenomena kemiskinan dan perkembangan transformasi digital dalam pelayanan publik; (2) penelusuran dan pengumpulan literatur yang relevan; (3) seleksi serta klasifikasi sumber data berdasarkan fokus penelitian; (4) analisis dan sintesis berbagai hasil penelitian terdahulu; (5) interpretasi hasil analisis berdasarkan teori dan kebijakan yang relevan; serta (6) penarikan kesimpulan mengenai kontribusi transformasi digital dalam meningkatkan efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Melalui tahapan tersebut diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan ekonomi, digitalisasi pelayanan publik, dan efektivitas program perlindungan sosial sebagai upaya mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Transformasi Digital dalam Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai

Transformasi digital telah menjadi salah satu strategi utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Digitalisasi pelayanan publik dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pelayanan, memperkuat transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut **Mergel et al. (2019)**, transformasi digital di sektor publik tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan tata kelola organisasi, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, digitalisasi penyaluran bantuan sosial merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Dalam konteks Program Bantuan Langsung Tunai, pemerintah telah mengembangkan berbagai sistem informasi digital untuk mendukung proses pendataan, verifikasi, validasi, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat. Salah satu sistem yang memiliki peran penting adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. DTKS berfungsi sebagai basis data nasional yang memuat informasi mengenai masyarakat miskin dan rentan miskin yang menjadi sasaran berbagai program bantuan sosial. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2023), pemanfaatan DTKS mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan karena proses pembaruan data dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain DTKS, pemerintah juga mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai platform digital yang mendukung pengelolaan data kesejahteraan sosial secara lebih terintegrasi. Sistem ini memungkinkan proses identifikasi, verifikasi, dan validasi data dilakukan secara elektronik sehingga mengurangi potensi kesalahan administrasi dalam penyaluran bantuan sosial. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2022), implementasi SIKS-NG telah meningkatkan efisiensi pengelolaan data penerima bantuan serta mempercepat proses distribusi bantuan kepada masyarakat. Keberadaan sistem ini menunjukkan bahwa transformasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan sosial di Indonesia.

Transformasi digital dalam penyaluran BLT juga mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Melalui SPBE, proses pelayanan publik diarahkan pada integrasi berbagai sistem informasi pemerintah sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Menurut Kementerian PANRB (2023), digitalisasi pelayanan publik mampu meningkatkan efisiensi birokrasi serta memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam implementasi BLT, penerapan SPBE memungkinkan koordinasi data antarinstansi menjadi lebih efektif sehingga meminimalkan duplikasi data penerima bantuan.

Dari perspektif ekonomi, transformasi digital memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas kebijakan perlindungan sosial. Ketepatan sasaran penerima bantuan akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sekaligus memperbesar dampak bantuan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. OECD (2020) menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik mampu meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah melalui pengelolaan data yang lebih akurat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, World Bank (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam sistem bantuan sosial dapat mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan pengaruh positif terhadap kualitas implementasi Program Bantuan Langsung Tunai. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan sistem informasi digital mampu mempercepat proses pendataan masyarakat, meningkatkan akurasi penetapan penerima bantuan, serta memperkecil potensi penyimpangan dalam proses penyaluran bantuan sosial. Sarker et al. (2021) menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik memungkinkan pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunai tidak hanya dipengaruhi oleh besaran bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas sistem informasi yang mendukung proses implementasi kebijakan tersebut.

3.2 Pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pemberian bantuan tunai memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya beli, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Menurut Todaro dan Smith (2021), bantuan sosial merupakan bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Melalui pemberian bantuan tunai, masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehingga dapat mempertahankan tingkat kesejahtraannya, terutama pada masa krisis ekonomi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Langsung Tunai memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Farhan dan Putri (2021) menyatakan bahwa bantuan tunai mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin sehingga konsumsi rumah tangga tetap terjaga meskipun terjadi tekanan ekonomi. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Nasution dan Harahap (2021) yang menjelaskan bahwa BLT berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga selama pandemi Covid-19 karena mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan, serta kebutuhan kesehatan. Selain itu, Badan Pusat Statistik (2024) melaporkan bahwa berbagai program perlindungan sosial, termasuk BLT, berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah.

3.3 Efektivitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam Meningkatkan Ketepatan Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai

Keberhasilan implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak hanya dipengaruhi oleh besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sistem pendataan penerima bantuan. Dalam era transformasi digital, pemerintah Indonesia telah memanfaatkan teknologi informasi melalui pengembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data utama dalam penentuan sasaran penerima berbagai program bantuan sosial. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2023), DTKS merupakan sistem informasi nasional yang memuat data masyarakat miskin dan rentan miskin yang diperoleh melalui proses pendataan, verifikasi, validasi, serta pemutakhiran secara berkala oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penyaluran bantuan sosial sehingga diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Digitalisasi pendataan melalui DTKS memberikan perubahan yang signifikan dibandingkan dengan sistem pendataan konvensional. Sebelum diterapkannya sistem digital, proses identifikasi masyarakat miskin masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pembaruan data, serta terjadinya penerima ganda (*double beneficiary*). Menurut World Bank (2022), pemanfaatan basis data digital dalam program perlindungan sosial mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses verifikasi penerima bantuan, dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Dengan demikian, transformasi digital menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas implementasi kebijakan bantuan sosial.

Selain DTKS, pemerintah juga mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai platform digital yang mendukung pengelolaan data kesejahteraan sosial secara lebih terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pemerintah melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2022), penggunaan SIKS-NG mampu mempercepat proses validasi data penerima bantuan sehingga kesalahan administrasi dapat diminimalkan. Keberadaan sistem tersebut juga memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan sosial secara nasional.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi DTKS dan SIKS-NG memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketepatan sasaran Program Bantuan Langsung Tunai. Penelitian Rahayu dan Permana (2022) menjelaskan bahwa pemanfaatan sistem informasi digital mampu mengurangi kesalahan dalam proses identifikasi masyarakat miskin sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Purwanto et al. (2023) yang menyatakan bahwa integrasi sistem informasi kesejahteraan sosial mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui penyediaan data yang lebih akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh berbagai instansi pemerintah.

Meskipun demikian, implementasi DTKS dan SIKS-NG masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya kualitas data akibat dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat yang

berubah dengan cepat. Perubahan status pekerjaan, perpindahan tempat tinggal, maupun perubahan kondisi ekonomi keluarga sering kali belum tercatat secara real time sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian data penerima bantuan. Menurut OECD (2021), keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga memerlukan tata kelola data (*data governance*) yang baik agar informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan selalu akurat dan mutakhir.

Selain kualitas data, keberhasilan implementasi sistem digital juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut. Masih terdapat perbedaan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam memanfaatkan aplikasi digital sehingga proses pemutakhiran data belum berjalan secara optimal. Mergel et al. (2019) menjelaskan bahwa transformasi digital di sektor publik memerlukan perubahan budaya organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta komitmen kelembagaan agar implementasi teknologi dapat memberikan manfaat yang maksimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan dan pendampingan teknis menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan digitalisasi pelayanan publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital melalui DTKS dan SIKS-NG telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai. Sistem informasi digital mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, mempercepat proses penyaluran, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial. Namun demikian, optimalisasi implementasi sistem tersebut masih memerlukan peningkatan kualitas data, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar tujuan program penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3.4 Tantangan Transformasi Digital dalam Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai

Meskipun transformasi digital memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Salah satu tantangan utama adalah kualitas data penerima bantuan yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang terjadi secara dinamis menyebabkan proses pembaruan data sering kali tertinggal sehingga masih ditemukan masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara sebagian penerima bantuan sudah tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada kualitas pengelolaan data yang dilakukan secara berkelanjutan (Rahayu & Permana, 2022).

Selain itu, kesenjangan infrastruktur digital masih menjadi kendala dalam implementasi pelayanan publik berbasis teknologi di berbagai daerah. Wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet, jaringan komunikasi, dan fasilitas teknologi informasi mengalami hambatan dalam proses penginputan serta sinkronisasi data penerima bantuan. Menurut World Bank (2022), kesenjangan infrastruktur digital merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan digital government di negara berkembang karena dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik dan pemerataan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Tingkat literasi digital masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan layanan digital yang disediakan pemerintah, seperti proses pengecekan status penerima bantuan melalui aplikasi atau portal resmi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tetap bergantung pada informasi yang diperoleh secara manual sehingga tujuan digitalisasi pelayanan publik belum sepenuhnya tercapai. UNDP (2022) menegaskan bahwa peningkatan literasi digital masyarakat menjadi salah satu prasyarat penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital sektor publik.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, keamanan dan perlindungan data pribadi juga menjadi isu penting dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial. Penggunaan sistem digital mengharuskan pemerintah menjaga kerahasiaan data masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip keamanan informasi dan perlindungan data menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses transformasi digital dalam pelayanan publik (OECD, 2021; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi).

Secara keseluruhan, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya persoalan adopsi teknologi, tetapi juga berkaitan dengan penguatan tata kelola data, pembangunan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta perlindungan data masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung implementasi transformasi digital yang mampu meningkatkan efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai sebagai instrumen kebijakan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia

3.3 Efektivitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam Meningkatkan Ketepatan Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai

Keberhasilan implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak hanya dipengaruhi oleh besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sistem pendataan penerima bantuan. Dalam era transformasi digital, pemerintah Indonesia telah memanfaatkan teknologi informasi melalui pengembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data utama dalam penentuan sasaran penerima berbagai program bantuan sosial. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2023), DTKS merupakan sistem informasi nasional yang memuat data masyarakat miskin dan rentan miskin yang diperoleh melalui proses pendataan, verifikasi, validasi, serta pemutakhiran secara berkala oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penyaluran bantuan sosial sehingga diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Digitalisasi pendataan melalui DTKS memberikan perubahan yang signifikan dibandingkan dengan sistem pendataan konvensional. Sebelum diterapkannya sistem digital, proses identifikasi masyarakat miskin masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pembaruan data, serta terjadinya penerima ganda (*double beneficiary*). Menurut World Bank (2022), pemanfaatan basis data digital dalam program perlindungan sosial mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses verifikasi penerima bantuan, dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Dengan demikian, transformasi digital menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas implementasi kebijakan bantuan sosial.

Selain DTKS, pemerintah juga mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai platform digital yang mendukung pengelolaan data kesejahteraan sosial secara lebih terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pemerintah melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2022), penggunaan SIKS-NG mampu mempercepat proses validasi data penerima bantuan sehingga kesalahan administrasi dapat diminimalkan. Keberadaan sistem tersebut juga memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan sosial secara nasional.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi DTKS dan SIKS-NG memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketepatan sasaran Program Bantuan Langsung Tunai. Penelitian Rahayu dan Permana (2022) menjelaskan bahwa pemanfaatan sistem informasi digital mampu mengurangi kesalahan dalam proses identifikasi masyarakat miskin sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Purwanto et al. (2023) yang menyatakan bahwa integrasi sistem informasi kesejahteraan sosial mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui penyediaan data yang lebih akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh berbagai instansi pemerintah.

Meskipun demikian, implementasi DTKS dan SIKS-NG masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya kualitas data akibat dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berubah dengan cepat. Perubahan status pekerjaan, perpindahan tempat tinggal, maupun perubahan kondisi ekonomi keluarga sering kali belum tercatat secara real time sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian data penerima bantuan. Menurut OECD (2021), keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga memerlukan tata kelola data (*data governance*) yang baik agar informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan selalu akurat dan mutakhir.

Selain kualitas data, keberhasilan implementasi sistem digital juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut. Masih terdapat perbedaan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam memanfaatkan aplikasi digital sehingga proses pemutakhiran data belum berjalan secara optimal. Mergel et al. (2019) menjelaskan bahwa transformasi digital di sektor publik memerlukan perubahan budaya organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta komitmen kelembagaan agar implementasi teknologi dapat memberikan manfaat yang maksimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan dan pendampingan teknis menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan digitalisasi pelayanan publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital melalui DTKS dan SIKS-NG telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai. Sistem informasi digital mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, mempercepat proses penyaluran, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial. Namun demikian, optimalisasi implementasi sistem tersebut masih memerlukan peningkatan kualitas data, penguatan koordinasi

antarlembaga, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar tujuan program penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3.4 Tantangan Transformasi Digital dalam Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai

Meskipun transformasi digital memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Salah satu tantangan utama adalah kualitas data penerima bantuan yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang terjadi secara dinamis menyebabkan proses pembaruan data sering kali tertinggal sehingga masih ditemukan masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara sebagian penerima bantuan sudah tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada kualitas pengelolaan data yang dilakukan secara berkelanjutan (Rahayu & Permana, 2022).

Selain itu, kesenjangan infrastruktur digital masih menjadi kendala dalam implementasi pelayanan publik berbasis teknologi di berbagai daerah. Wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet, jaringan komunikasi, dan fasilitas teknologi informasi mengalami hambatan dalam proses penginputan serta sinkronisasi data penerima bantuan. Menurut World Bank (2022), kesenjangan infrastruktur digital merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan digital government di negara berkembang karena dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik dan pemerataan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Tingkat literasi digital masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan layanan digital yang disediakan pemerintah, seperti proses pengecekan status penerima bantuan melalui aplikasi atau portal resmi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tetap bergantung pada informasi yang diperoleh secara manual sehingga tujuan digitalisasi pelayanan publik belum sepenuhnya tercapai. UNDP (2022) menegaskan bahwa peningkatan literasi digital masyarakat menjadi salah satu prasyarat penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital sektor publik.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, keamanan dan perlindungan data pribadi juga menjadi isu penting dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial. Penggunaan sistem digital mengharuskan pemerintah menjaga kerahasiaan data masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip keamanan informasi dan perlindungan data menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses transformasi digital dalam pelayanan publik (OECD, 2021; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi).

Secara keseluruhan, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya persoalan adopsi teknologi, tetapi juga berkaitan dengan penguatan tata kelola data, pembangunan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta perlindungan data masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung implementasi transformasi digital yang mampu meningkatkan efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai sebagai instrumen kebijakan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah meningkatkan kualitas pendataan, mempercepat proses verifikasi dan validasi penerima bantuan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berperan sebagai inovasi teknologi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam reformasi tata kelola pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Dari perspektif ekonomi, Program Bantuan Langsung Tunai terbukti mampu membantu menjaga daya beli masyarakat miskin, meningkatkan konsumsi rumah tangga, serta mengurangi tekanan ekonomi yang dihadapi kelompok rentan. Efektivitas program tersebut semakin meningkat ketika didukung oleh sistem informasi digital yang mampu menghasilkan data penerima bantuan secara lebih akurat dan mutakhir. Dengan demikian, transformasi digital menjadi faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan kebijakan perlindungan sosial dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa implementasi transformasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kualitas data yang belum sepenuhnya akurat, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah, rendahnya literasi digital masyarakat, serta perlunya

penguatan keamanan dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan pembaruan data secara berkala, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas infrastruktur digital, serta memperkuat kolaborasi antarlembaga agar implementasi sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial dapat berjalan secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi dan transformasi digital dalam menganalisis efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan sosial yang lebih adaptif, berbasis data, transparan, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pengentasan kemiskinan

Referensi

1. Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
2. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
3. Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial Intelligence for the Real World. *Harvard Business Review*, 96(1), 108–116.
4. Janssen, M., van der Voort, H., & Wahyudi, A. (2017). Factors Influencing Big Data Decision-Making Quality. *Journal of Business Research*, 70, 338–345.
5. Kementerian PANRB Republik Indonesia. (2023). *Laporan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Jakarta: Kementerian PANRB.
6. Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
7. Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
8. Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
9. Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining Digital Transformation: Results from Expert Interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385.
10. OECD. (2020). *The OECD Digital Government Policy Framework: Six Dimensions of a Digital Government*. Paris: OECD Publishing.
11. OECD. (2021). *Social Protection System Review of Indonesia*. Paris: OECD Publishing.
12. Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
13. Purwono, R., Wardana, W. W., Haryanto, T., & Mubin, M. K. (2021). Poverty Dynamics in Indonesia: Empirical Evidence from Three Main Approaches. *World Development Perspectives*, 23, 100346. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100346>
14. Rahayu, S., & Permana, R. (2022). Analisis Ketepatan Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 6(1), 55–66.
15. Sarker, S., et al. (2021). Digital Transformation of Public Service: Challenges and Opportunities. *Government Information Quarterly*, 38(3), 101540.
16. Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
17. Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
18. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
19. United Nations. (2022). *E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*. New York: United Nations.
20. United Nations Development Programme. (2022). *Human Development Report 2021/2022*. New York: UNDP.
21. World Bank. (2022). *World Development Indicators*. Washington, DC: World Bank.
22. World Bank. (2022). *Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures*. Washington, DC: World Bank.
23. World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Seizing the Momentum*. Washington, DC: World Bank.
24. Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.